

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan publik* (Cet. 1). CV. Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Kota Semarang. (n.d.). *Home*. Diakses pada 10 September 2024, dari <https://semarangkota.bps.go.id/id>
- Bappeda Kota Semarang. (n.d.). Diakses pada 11 Oktober 2024, dari <https://bappeda.semarangkota.go.id/kontak#/>
- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I. (n.d.). *Home*. Diakses pada 10 November 2024, dari <https://cabdindikwil1.com/>
- Cahyani, M. E., Sulandari, S., & Hariani, D. (2021). Peran Dinas Sosial Kota Semarang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Disabilitas. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 224-237.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. (n.d.). *Home*. Diakses pada 10 September 2024, dari <https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/>
- Dinas Perdagangan Kota Semarang. (n.d.). *Visi dan misi*. Diakses pada 30 Oktober 2024, dari <https://dinasperdagangan.semarangkota.go.id/visi-dan-misi/>
- Efriandi, T. (2010). *Evaluasi kebijakan*. FISIP Universitas Indonesia. Diakses dari lontar.ui.ac.id, halaman 11-16.
- GoodStats. (2023, Mei 1). *Jumlah sekolah luar biasa di Indonesia tidak merata: Sekolah swasta mendominasi*. Diakses dari <https://goodstats.id/article/jumlah-sekolah-luar-biasa-di-indonesia-tidak-merata-sekolah-swasta-mendominasi-aH2ys>
- Irdamurni. (2019). *Pendidikan inklusif: Solusi dalam mendidik anak berkebutuhan khusus* (Cet. 1). Perdanamedia Group.
- Kayama, M., Haight, W., Kincaid, T., & Evans, K. (2015). Local implementation of disability policies for “high incidence” disabilities at public schools in Japan and the US. *Children and Youth Services Review*, 52, 34-44.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (n.d.). *Progres sinkronisasi SLB. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah*. Diakses pada 28 Oktober 2024, dari <https://dapo.kemdikbud.go.id/progres-slb/1/010000>
- Kurniawan, T. (2007). Pergeseran paradigma administrasi publik: Dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance. *Jurnal Ilmu*

Administrasi Negara, 7(1), 16-17.

- Larasati, N. A. (2018). Implementasi Kebijakan Kesamaan Kesempatan Kerja bagi penyandang disabilitas di DKI (Studi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Lestari, E. Y., & Sumarto, S. (2021). Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang. *Integralistik*. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.28731>.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosadakarya.
- Nawawi, I. (2009). *Public policy: Analisis, strategi advokasi teori dan praktek*. PMN.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Perda 1 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
- Perri, M., McColl, M. A., Khan, A., & Jetha, A. (2021). Scanning and synthesizing Canadian policies that address the school-to-work transition of youth and young adults with disabilities. *Disability and health journal*, 14(4), 101122.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Ratna, D. G., & Kismartini, K. (2018). Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di Kota Semarang (Implementasi Perda Jawa Tengah No. 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas). *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 177-196.
- S. N. (2018). Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 15(2), 251-272.
- SLB Negeri Semarang. (n.d.). *SLB Negeri Semarang*. Diakses pada 15 Oktober 2024, dari <https://slbnegerisemarang.com/>
- BBPMP Provinsi Jawa Tengah. (2020). *Peningkatan mutu pendidikan jenjang SLB Provinsi Jawa Tengah*. Diambil dari <https://bbpmpjateng.kemdikbud.go.id>
- Subarsono, A. (2013). *Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi*. Pustaka Pelajar.

- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. CV Alfabeta.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI).
- Therawati, C. A., & Rusdarti, R. (2019). Analisis Pelayanan Publik Bidang Transportasi untuk Difabel di Kota Semarang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 2(2), 387-394.
- Triana, F. U., & Astuti, R. S. (2022). Determinan Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang. *Journal Of PublicPolicy and Management Review*, 11(1), 66-82.
- Ziviani, J., Darlington, Y., Feeney, R., & Head, B. (2011). From policy to practice: A program logic approach to describing the implementation of early intervention services for children with physical disability. *Evaluation and Program Planning*, 34(1), 60-68.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Data jumlah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Kota Semarang. (2023). Laporan alokasi anggaran pendidikan inklusif Kota Semarang. Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Dapodikdasmen. (2023). Data jumlah dan distribusi Sekolah Luar Biasa di Kota Semarang. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Hapsari, A. (2020). Evaluasi koordinasi antar instansi dalam implementasi kebijakan pendidikan inklusif. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 234–245.
- Kemdikbud. (2021). Laporan keterbatasan fasilitas di SLBN dan dampaknya terhadap hak pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Lingkarjateng.id. (2022). Keterbatasan sumber daya manusia di SLBN Semarang menjadi kendala pendidikan inklusif. Diakses dari <https://lingkarjateng.id>.
- Puspitasari, R. (2021). Kebijakan zonasi pendidikan dan dampaknya bagi penyandang disabilitas. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 145–158.
- Sumarto, D. (2020). Kualitas layanan pendidikan dan kendala tenaga

pendidik di SLBN Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, 8(1), 89–102.

Ulan, A. (2020). Sosialisasi pendidikan inklusif dan tantangan stigma sosial di Kota Semarang. *Jurnal Pendidikan Inklusif*, 5(4), 56–71.

UNICEF. (2022). Laporan tantangan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. United Nations Children's Fund.

Pemerintah Kota Semarang. (2020). Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Semarang: Pemerintah Kota Semarang.